

FORUM FREEDOM, 16 Juli 2007

**Tema: Buku Muslim Demokrat**

Narasumber: Saiful Mujani (SM)

Moderator: Hamid Basyaib (HB).

HB:

Halo, selamat pagi saudara. Anda kembali bersama saya Hamid Basyaib dalam Forum Freedom. Dan tamu saya pagi ini adalah Dr. Saiful Mujani. Selamat pagi bung Saiful.

SM:

Selamat pagi bung hamid.

HB:

Dia adalah Direktur Eksekutif LSI dan Pengajar di UIN Syarif Hidayatullah. Beliau di sini dalam rangka peluncuran bukunya, *Muslim Demokrat: Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca-Orde Baru*.

Latar belakangnya adalah bahwa para sarjana Barat, seperti Samuel Huntington, Bernard Lewis, dan Ellie Kedourie memandang Islam dan demokrasi sebagai dua makhluk yang berbeda, dan keduanya berjalan sendiri-sendiri. Bahkan mereka mengklaim bahwa Islam bertanggung jawab atas kegagalan konsolidasi demokrasi di negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Semakin kuat Islam dalam suatu masyarakat, demokrasi semakin tidak mungkin tumbuh di masyarakat tersebut.

Pandangan mereka seakan-akan mengamini temuan Freedom House yang terangkum dalam Index of Political Right and Civil Liberty. Menurut temuan ini, dalam tiga dekade terakhir, hanya ada satu negara Muslim yang mampu membangun demokrasi secara penuh selama lebih dari lima tahun, yaitu Mali di Afrika. Dua belas negara Muslim lainnya termasuk dalam kelompok semi-demokratis. Sisanya, yakni 35 negara, bersifat otoritarian. Lebih dari itu, delapan dari 13 negara dengan pemerintahan paling represif di dunia pada dekade yang lalu adalah negara-negara Muslim.

Bung Saiful, sebenarnya apa tesis utama buku anda ini?

SM:

Tesis utamanya adalah ingin melihat secara empiris bagaimana demokrasi berkembang di sebuah negara yang mayoritas penduduknya Muslim.

Jadi saya ingin melihat secara empiris bagaimana kekuatan dan kelemahan argumen bahwa demokrasi itu tidak bisa berkembang di negara Muslim karena Islam itu merupakan faktor yang menghambat perkembangan demokrasi.

Setelah saya menelaah secara empiris, dengan kasus Indonesia, saya tidak melihat di Indonesia Islam sebagai faktor yang menghambat jalannya demokrasi dalam sebuah masyarakat Muslim.

Ini Indonesia pasca-Orde Baru tentu saja. Dan saya juga ingin melihat bahwa kalau Indonesia sudah menganut demokrasi, maka pertanyaannya apakah demokrasi Indonesia itu akan stabil atau tidak.

Stabilitas dan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung stabilitas itu harus kita cermati. Saya juga melihat faktor-faktor yang disebut sebagai budaya demokrasi. Sejauh mana Masyarakat Muslim Indonesia punya budaya kultural yang membenarkan demokrasi itu sendiri.

Itu beberapa hal yang menjadi tesis pokok buku ini.

Nah, saya menemukan sebuah kesimpulan umum bahwa demokrasi dengan segala elemennya, dan Islam dengan segala elemennya, setelah dianalisa secara empiris, kita tidak menemukan hubungan negatif sebagaimana diasumsikan oleh banyak sarjana Barat belakangan ini.

Bahkan sebaliknya, ada unsur-unsur penting dalam Islam yang bisa membuat demokrasi itu berjalan dan stabil.

Bisa jadi kesimpulan ini hanya terbatas pada kasus Indonesia. Jadi memang harus diuji dalam kasus-kasus yang lain.

Cara yang saya lakukan ini memang hanya bisa dilakukan di negara yang relatif terbuka. Ini karena hal ini melibatkan observasi untuk melihat pandangan masyarakat biasa tentang demokrasi.

Ini sulit dilakukan dalam masyarakat-masyarakat yang tertutup. Di Timur Tengah banyak masyarakat yang tertutup. Karena itu tidak mudah juga untuk menguji apakah tidak demokratisnya mereka itu karena faktor Islam atau faktor yang lain.

Bisa jadi klaim yang dibuat Huntington, Lewis dan banyak sarjana lain itu benar, tapi bisa juga tidak benar.

Memang, dalam tradisinya, Islam tidak mengenal demokrasi. Tapi itu tidak khas Islam. Peradaban lain pun, agama lain pun tidak mengenal demokrasi. Demokrasi memang suatu gejala baru dalam peradaban manusia.

Oleh karena itu saya melihat bahwa bisa jadi tidak munculnya demokrasi di negara-negara Arab itu bukan karena faktor Islam, tapi karena faktor yang lain. Tapi bisa juga karena faktor agama.

Tapi semua asumsi ini agak susah dibuktikan dalam konteks negara-negara Muslim di Timur Tengah. Karena di sana untuk mengujinya pun tidak mudah, tidak bisa.

HB:

Bahwa mereka itu tidak demokratis, bahwa negara-negara Arab itu otoriter, itu sudah jelas.

Pertanyaannya adalah apakah itu disebabkan oleh faktor Islam atau tidak.

SM:

Ya. Itu pertanyaannya.

HB:

Nah, ini menarik. Berdasarkan dua survei opini publik yang anda lakukan, terdapat bukti bahwa Islam sebenarnya bukan faktor penghambat tumbuhnya demokrasi dalam suatu masyarakat.

Nah, pertanyaan saya, apakah Huntington dan kawan-kawan itu tidak mempertimbangkan Indonesia, sehingga dia bisa sampai kesimpulan yang demikian desisif itu.

SM:

Sebenarnya, argumen mereka itu saya kira bisa dipahami. Karena dalam membuat kesimpulan itu yang dilihat pola umum.

Jadi Indonesia untuk sementara bisa dilihat sebagai pengecualian dari kecenderungan umum di negara Muslim.

Karena negara Muslim seperti yang anda katakan tadi, itu mayoritas tidak menganut demokrasi.

Juga ada pengecualian seperti Mali di Afrika. Oleh karena itu pengecualian itu menjadi menarik. Karena terjadi penyimpangan dari kecenderungan umum tersebut. Apakah ini karena faktor agama.

Sekali lagi, untuk kasus Timur Tengah itu tidak mudah karena tidak munculnya demokrasi di sana bisa karena budaya politik yang bersandar pada agama, seperti yang dikatakan Huntington, tapi bisa juga bukan karena itu.

Timur Tengah adalah wilayah konflik sehingga masalah keamanan menjadi prioritas utama. Tapi Israel ternyata bisa demokratis. Dia berada di wilayah yang sama. Dia juga memrioritaskan keamanan, tapi juga bisa demokratis.

Kasus seperti Indonesia dan Mali ini hanya bisa digunakan untuk memperingatkan Huntington bahwa anda harus hati-hati karena ada penyimpangan-penyimpangan dari pola umum.

HB:

Baik. Kita akan istirahat sebentar Bung Saiful. Saudara anda masih bersama saya Hamid Basyaib dalam forum freedom, dan kita akan beristirahat sebentar.

\*\*\*

HB:

Selamat pagi lagi saudara, anda masih bersama Forum Freedom. Saya Hamid Basyaib dan tamu saya masih yang tadi Dr. Saiful Mujani. Dan tadi dia sudah menceritakan tesis utama bukunya, *Muslim Demokrat*.

Intinya dia melihat ada pengecualian dari tesis besar Huntington, Bernard Lewis dan lain-lain. Mereka bilang bahwa Islam itu tidak kompatibel dengan demokrasi. Negara-negara Arab semuanya tidak demokratis.

Mereka bilang hanya dua belas negara Muslim yang termasuk dalam kelompok semi-demokratis. Sisanya, yakni 35 negara, bersifat otoritarian. Lebih dari itu, delapan dari 13 negara dengan pemerintahan paling represif di dunia pada dekade yang lalu adalah negara-negara Muslim.

Yang menarik, temuan anda, Bung Saiful, menunjukkan bahwa Islam bukan penghambat demokrasi di Indonesia.

Nah, jika anda bertemu Huntington dan Lewis, apa yang akan anda katakan. Apakah anda hanya bilang bahwa yang anda temukan ini suatu pengecualian.

Studi anda mungkin menunjukkan bahwa pola penafsiran Islam di Indonesia sejalan atau bahkan memperkuat demokrasi.

SM:

Melihat bahwa di Timur Tengah sampai sekarang ini belum ada demokrasi, dan itu menunjukkan bahwa argumen mereka itu benar, mungkin saya tidak bisa membantahnya. Itu fakta.

HB:

Membantah secara langsung ya.

SM:

Ya, secara langsung. Itu fakta.

Tapi saya ingin menunjukkan sebuah kasus. Sebuah cerita yang lain, yakni Indonesia. Para penafsir Islam di Indonesia itu jika anda perhatikan, Bung Hamid, itu memandang demokrasi secara bagus.

HB:

Sejak kelahiran negara ini.

SM:

Ya.

Jadi ada yang berpandangan bahwa demokrasi bagaimanapun juga adalah sebuah sistem yang memungkinkan adanya hubungan antara berbagai kelompok keagamaan yang punya penafsiran berbeda-beda.

Nah, menurut saya, faktor keragaman ini juga memengaruhi cara pandang umat Islam di Indonesia terhadap demokrasi.

Islam di Indonesia itu punya banyak varian. Ada kelompok Islam tapi punya pandangan yang sekular. Dan ini kuat di antara para pemimpin agama.

HB:

Orang seperti Bung Karno, Hatta, Sjahrir.

SM:

Ya. Orang-orang seperti itu.

Jadi faktor-faktor inilah yang memengaruhi Islam dan demokrasi di Indonesia. Para pemimpin ini juga mengklaim dirinya sebagai Muslim.

Jadi di sinilah penafsiran Islam dalam konteks demokrasi terjadi. Keinginan untuk membangun demokrasi.

Hal-hal seperti ini tidak muncul di Timur Tengah, setidaknya di Arab Saudi. Jadi sejarah itu juga membentuk demokrasi.

Nah, masalahnya adalah seberapa jauh warisan itu diinternalisasi dalam masyarakat. Artinya, masyarakat membenarkan cara pandang elite yang demikian itu.

Ini menjadi penting terutama untuk membuat demokrasi menjadi stabil. Karena jika gagasan elite itu tidak diinternalisasi masyarakat, maka gagasan para elite tersebut sangat mudah menghilang.

HB:

Anda menyebut soal faktor kolonial. Para pendiri bangsa itu semua hasil didikan Belanda, mungkin sebagian ada yang dari pesantren.

Mungkinkah budaya demokratis itu adalah hasil dari didikan Belanda. Belanda, sambil menjajah, mereka punya pengadilan yang benar-benar fair. Inlander ini bisa menang di pengadilan. Sementara di Timur Tengah hal ini tidak ada.

Ini menarik. Di Afrika dan Asia, negara-negara Muslim semuanya pernah diduduki oleh negara Barat yang kurang lebih adalah negara demokratis. Namun toh di negara itu tidak muncul demokrasi. Bagaimana anda melihat hal ini.

SM:

Benar.

Ada sejumlah studi yang mengkaji hubungan kolonisasi dengan tipe-tipe rezim yang muncul kemudian.

Negara-negara yang dijajah Inggris itu cenderung menjadi negara demokratis.

HB:

Lahir sebagai negara demokratis, ya.

SM:

Pola itu kelihatan. Misalnya, Malaysia, India, dan sampai tingkat tertentu Pakistan. Inggris itu punya tradisi politik liberal. Belanda itu punya karakteristik yang kurang lebih mirip Inggris.

Sementara Prancis itu tradisinya revolusioner. Ini juga mewarnai. Para intelektual dari negara Prancis ini memang lain dari para intelektual yang muncul dari Inggris atau Belanda.

Namun, lepas dari itu, ada hal-hal yang di Timur Tengah tidak ada, tapi di Indonesia ada. Ini adalah pentingnya kekuatan masyarakat sipil. Di Timur Tengah tidak ada organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah. Semua organisasi yang ada di sana terkooptasi oleh negara.

Di sini NU relatif otonom. Bahkan zaman Orde Baru pun, resistensi itu kelihatan. Misalnya pada zaman Abdurrahman Wahid, terlihat oposisi itu.

Nah, salah satu unsur dari masyarakat sipil itu adalah keterlibatan sipil. Misalnya, tahlilan, slametan, dsb. Dalam kegiatan ini ada kolektivitas yang membuat masyarakat lebih terlibat secara sosial.

HB:

Dengan demikian jelas bahwa kita punya masyarakat sipil. Namun sayang sekali waktunya habis. Saya ucapkan selamat kepada Bung Saiful.

Bung Saiful, dengan itu kita akhiri Forum Freedom kita kali ini. Terima kasih atas kehadiran anda di studio. Dan saudara begitulah akhir dari Forum Freedom kita, saya Hamid Basyaib mundur diri dan sebelumnya anda bisa mengirim sms ke 021 70497497,

sekali lagi 021 70497497. Saya tunggu sms anda untuk komentarnya, kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalam.